



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2022 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 13 Januari 2023

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P.,MMP
NIP. 19711123 199903 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan maupun bimtek serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 sebesar **107,04**.

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2022 sebesar Rp. 57.982.619.000,-. kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 52.957.149.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 52.935.602.148,- atau 99,96%. Apabila disandingkan antara Nilai Kinerja Organisasi sebesar **107,04** dan realisasi anggaran sebesar **99,96%**, maka Pangkalan PSDKP Batam memperoleh nilai efisiensi sebesar **8,97**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	2
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam	9
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Batam	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	64
BAB IV PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Rekomendasi	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022	11
2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022	12
3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Tahun 2022 ...	15
4. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	7
3. Efisiensi Pangkalan PSDKP Batam	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2022 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai Laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2022.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Penangkapan Ikan

- a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA); dan
- b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan
- b. Adanya kegiatan penyelundupan *Baby Lobster* (BL) ke luar negeri.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

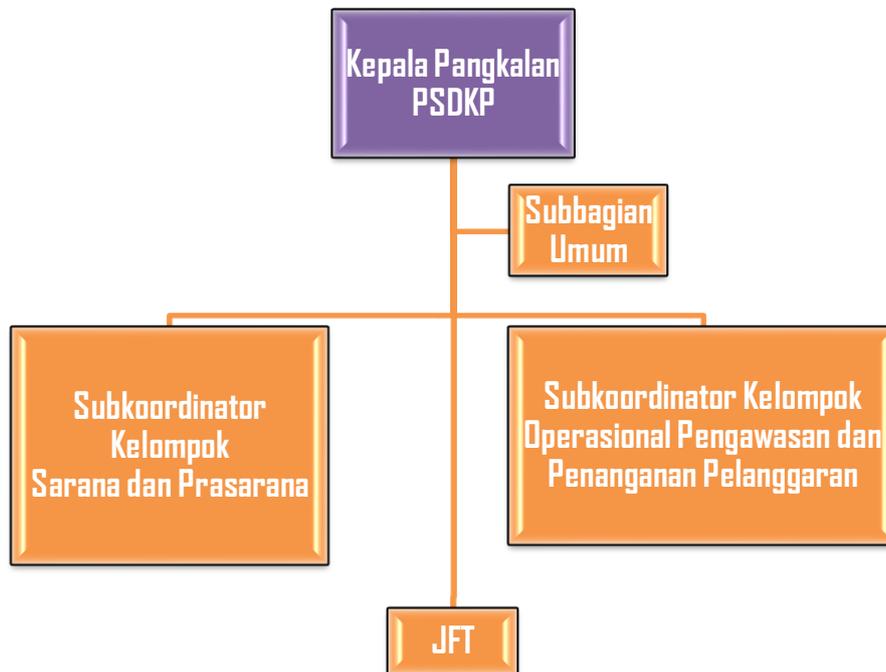
1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
 - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;

- d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
 - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
 - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
 - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
 4. Operasional 15 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
 5. Pendampingan POKMASWAS;
 6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPP; dan
 7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum, Subkoordinator Sarana dan Prasarana, Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 153 pegawai yang terdiri dari 93 PNS dan 60 tenaga kontrak sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing kelompok Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, prodrum dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasu, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparaturnya serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;

- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Subkoordinator Kelompok Sarana dan Prasarana

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Subkoordinator Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan maupun Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan maupun penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2022.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Pangkalan PSDKP Batam pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP. Dalam implementasinya, Renstra tersebut dijadikan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Pangkalan PSDKP Batam dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024. Kemudian target selama periode renstra 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam

A. Visi

Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 - 2024 adalah "Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab"

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 – 2024, maka ditetapkan Misi Pangkalan PSDKP Batam yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pangkalan PSDKP Batam maka dirumuskan beberapa tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui optimalnya pengawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 sebesar Rp. 57.982.619.000,-. Kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 52.957.149.000,-. Selain itu juga dilakukan revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2022 sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SEMULA	MENJADI
SK3.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	87,5	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,5	85
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	80	Dihilangkan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SEMULA	MENJADI
			lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)		

Kemudian setelah dilakukan revisi tersebut, berikut Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022 setelah disahkan:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	77
		ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Inovasi gugus kerja transformasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (unit)	
		ISK5.1.7 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.9 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	86
		ISK5.1.10 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		ISK5.1.12 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	81

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja pada Tahun 2022, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 7 Sasaran Strategis (SS) dengan 12 IKU dan 11 IK. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022			
				Target	Realisasi	%	
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	IKU 1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100	100	100	100,00
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	IKU 2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100	100	100	100,00
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	IKU 3	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87	87	100	114,94
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IKU 4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	85	85	94,38	111,04
		IKU 5	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	85	85	99,93	117,56

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022	CAPAIAN 2022		
					Target	Realisasi	%
		IKU 6	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90	100	100	111,11
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IKU 7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100,00
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	IKU 8	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93	93	99,33	106,81
		IKU 9	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93	93	98,33	105,73
		IKU 10	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93	93	98,33	105,73
		IKU 11	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80	80	100	120,00
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup	80	80	88,93	111,16

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022		
				Target	Realisasi	%
		Pangkalan PSKDP Batam (indeks)				
		IK 13 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75	75	80,58	107,44
		IK 14 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	77	77	80,43	104,45
		IK 15 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90	90	97,42	108,24
		IK 16 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21	21	23,16	110,29
		IK 17 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (unit)	1	1	1	100,00
		IK 18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75	75	100	120,00
		IK 19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75	75	100	120,00
		IK 20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	86	86	100	116,28
		IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup	70	70	100	120,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022		
				Target	Realisasi	%
		Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)				
		IK 22 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89	89	96,09	107,97
		IK 23 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	81	81	91,20	112,59

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2022 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan Target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2022.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

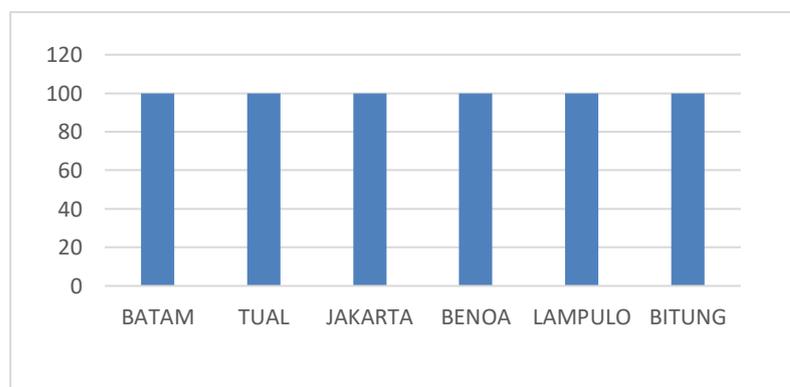
Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 1 (Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Kelautan yang Sesuai Ketentuan)** yaitu:

1) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	-	-	95	100	100	100	120,00	100

Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada tahun 2022 sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dua Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini.

Pada tahun 2022 dan 2021, capaian indikator ini sama yaitu 100%. Kemudian jika dibandingkan dengan target renstra, IKU “*Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan*” lingkup Pangkalan PSDKP Batam masih konsisten 100%.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2022 sama yaitu 100%. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2022 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Pada kegiatan pengawasan ikan dilindungi sampai dengan tahun 2022 sudah dilakukan pengawasan terhadap 5 pelaku usaha yang terdiri dari 1 pelaku usaha di Bintan, 2 pelaku usaha di Anambas dan 2 pelaku usaha di Natuna. Komoditas yang diawasi yaitu ikan Napoleon yang dibudidayakan pada keramba jaring apung.

Adapun anggaran tahun 2022 untuk pengawasan usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP sebesar Rp. 35.062.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 28.348.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 376.211.367,- atau 99,99%.

b) Pada kegiatan pengawasan produk dan jasa kelautan sampai dengan tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 31 pelaku usaha yang terdiri dari 8 pelaku usaha di Bangka, 5 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 4 pelaku usaha di Anambas, 2 pelaku usaha di Batam, 1 pelaku usaha di Belitung dan 11 pelaku usaha di Bintan. Produk kelautan yang dimaksud disini yaitu pasir laut dan timah. Lokasi yang menjadi target pengawasan yaitu di daerah Bangka dan Tanjung Balai Karimun. Sedangkan yang termasuk dalam jasa kelautan adalah BMKT dan Wisata Bahari. Untuk BMKT lokasi tersebar di daerah Batam, Anambas dan Belitung serta untuk daerah pengawasan Wisata bahari di Batam, Bintan, Anambas, Bangka dan Belitung. Pagu anggaran untuk operasional pengawasan jasa kelautan pada tahun 2022 sebesar Rp. 96.211.000,-. Dan terealisasi sebesar Rp. 96.207.942,- atau 99,99%

c) Untuk Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 30 pelaku usaha. Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap 13 pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir terkait reklamasi yang terdiri dari 8

pelaku usaha di Batam, 1 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun dan 4 pelaku usaha di Bintan. Kemudian dilakukan pengawasan terhadap 17 pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 1 pelaku usaha di Batam, 6 pelaku usaha di Bintan, 4 pelaku usaha di Natuna, 1 pelaku usaha di Moro dan 5 pelaku usaha di Anambas.

Pagu anggaran untuk Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 sebesar Rp. 34.800.000,-. Yang kemudian direvisi menjadi Rp. 32.759.000,-. Dari anggaran tahun 2022 tersebut terealisasi sebesar Rp. 32.758.546,- atau 99,99%.

- d) Pada kegiatan pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang patuh dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya tahun 2022 dilaksanakan terhadap 17 pelaku usaha yang terdiri 3 pelaku usaha, 7 pelaku usaha di Bangka dan 7 pelaku usaha di Palembang.

Adapun target lokasi pengawasan kegiatan ini yaitu Batam, Bangka dan Palembang. Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan pencemaran perairan pada tahun 2022 yaitu Rp. 47.467.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 56.328.000,- serta sudah terealisasi sebesar Rp. 56.327.296,- atau 99,99%.

- e). Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap 13 pelaku usaha yang terdiri dari 1 pelaku usaha di Batam, 2 pelaku usaha di Bangka, 2 pelaku usaha di Anambas, 1 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 3 pelaku usaha di Bintan dan 4 pelaku usaha di Palembang.

Pagu anggaran untuk operasional Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang pada tahun 2022

sebesar Rp. 466.669.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 376.233.000,-. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 376.211.367,- atau 99,99%.

f) Untuk pengawasan pelaku usaha perikanan yang patuh dari kegiatan *Destructive Fishing* lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 dilakukan terhadap 40 pelaku usaha yang terdiri dari 5 pelaku usaha di Bintan, 9 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat, 6 pelaku usaha di Natuna dan 20 pelaku usaha di Palembang. Dilakukan pemeriksaan pada kapal perikanan dengan ukuran <10GT yang seluruhnya tidak ditemukan bahan dan alat berbahaya diatas kapal. Adapun terdapat beberapa wilayah yang menjadi target pengawasan kegiatan ini yaitu Batam, Natuna, Tanjung Jabung Barat dan Palembang. Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan DF pada tahun 2022 sebesar Rp. 102.846.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 35.984.000,- serta sudah terealisasi sebesar Rp. 35.947.341,- atau 99,90%.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 2 (Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang Sesuai Ketentuan)**, yaitu:

2) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100	100	100	100,00	100

Capaian pada tahun 2022, indikator Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan mencapai target dengan presentase 100%. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam

meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan.

Sedangkan pada tahun 2022 dan 2021 pada IKU "*Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan*". Jika dibandingkan dengan tahun 2021, IKU ini masih konsisten dengan target dan capaian 100%. Presentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya tahun 2022 adalah 100% yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

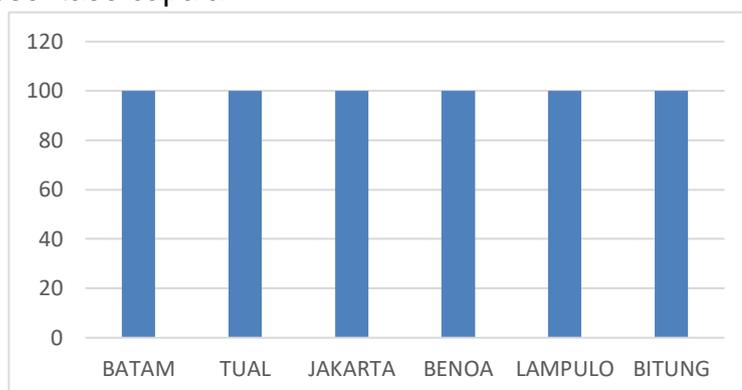
- 1) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa tahun 2022 lingkup Pangkalan PSDKP Batam sejumlah 1802 kapal perikanan. Capaian Komponen "*presentase unit usaha kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya*" mencapai 100%. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Untuk Pagu Pengawasan kapal perikanan dianggarkan sebesar Rp. 478.200.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 322.490.000,-. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 322.458.852,- atau 99,99%.
- 2) Jumlah UPI yang diperiksa Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 adalah 62 pelaku usaha. Hasil pengawasan tersebut terdiri dari 13 pelaku usaha di Batam, 6 pelaku usaha di Belitung, 10 pelaku usaha di Palembang, 5 pelaku usaha di Tanjungpinang, 5 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 4 pelaku usaha di Natuna, 9 pelaku usaha di Bangka, 3 pelaku usaha di Anambas, 5 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat dan 2 pelaku usaha di Moro. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Tahun 2022 pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 93.841.000,- yang direvisi menjadi Rp67.972.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.971.099,- atau 99,99%

- 3) Jumlah Unit Usaha Budidaya Ikan (UBI) yang diperiksa tahun 2022 sejumlah 20 pelaku usaha yang terdiri 5 pelaku usaha di Batam, 3 pelaku usaha di Belitung, 5 pelaku usaha di Palembang, 6 pelaku usaha di Bangka dan 1 pelaku usaha di Anambas. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk pengawasan unit usaha budidaya perikanan sebesar Rp. 152.000.000,- yang kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 100.490.000,- Realisasi unit usaha budidaya ikan yang terawasi terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2022 sebesar Rp. 100.476.520,- atau 99,98%.
- 4) Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa sejumlah 39 pelaku usaha dengan rincian yaitu 12 pelaku usaha Batam, 1 pelaku usaha di Moro, 3 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 3 pelaku usaha di Natuna, 1 pelaku usaha di Bintan, 9 pelaku usaha di Palembang, 3 pelaku usaha di Bangka, 4 pelaku usaha di Belitung dan 3 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pada tahun 2022 unit usaha distribusi pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000,-

yang selanjutnya direvisi menjadi Rp. 51.777.000,- Realisasi anggaran tahun 2022 untuk pengawasan usaha distribusi sebesar Rp 51.776.062,- atau 99,99%.

Pada tahun 2022 sebagian besar pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih mengurus perizinan berusaha setelah direkomendasikan oleh pengawas perikanan. Tercapainya indikator pengawasan sumber daya perikanan karena adanya pelaku usaha pada Nomor Izin Berusaha (NIB) memiliki lebih dari satu KBLI. Semakin banyak KBLI maka akan semakin terpenuhi capaian output yang ditargetkan serta apabila diformulasikan dalam perhitungan IKU ini dapat memperbesar presentase capaian.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2022 sama yaitu 100%. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Evaluasi dan analisis pada IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 3 (Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang Partisipatif)**, yaitu:

3) Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU3	Presentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	-	-	-	-	87	100	114,94	100

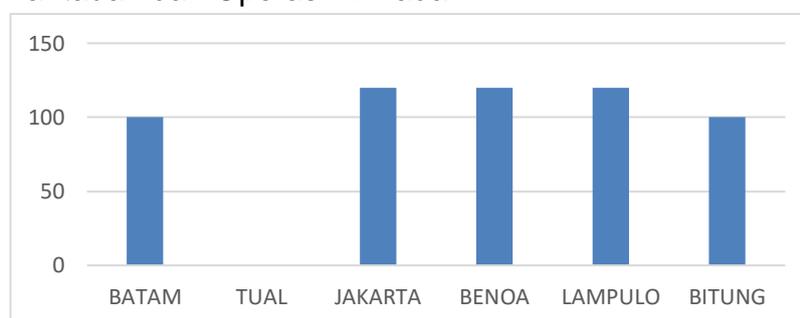
Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 ditargetkan sebesar 87% dan tercapai 100%. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam diperoleh dari perbandingan jumlah Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP dengan target jumlah Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP.

Pokmaswas yang ditergetkan untuk mendukung pengawasan SDKP sebelumnya telah dilakukan pembinaan oleh DKP Provinsi pada masing-masing daerah. Pembinaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pada setiap anggota Pokmaswas terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dalam melaksanakan pembinaan, DKP Provinsi telah mendapatkan acuan yaitu **“Form Keaktifan POKMASWAS”** yang disediakan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan kepada DKP Provinsi. Kemudian setiap Pokmaswas yang dianggap aktif apabila telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan form tersebut yang dilengkapi dengan dokumentasi. Setiap Pokmaswas dapat melaksanakan lebih dari satu kegiatan pengawasan yang diukur sebagai keaktifannya.

Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Kantor Satwas SDKP Palembang telah dilaksanakan sosialisasi **“Peningkatan kesadaran masyarakat dalam**

mengawasi SDKP melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat". Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang melibatkan Anggota Komisi IV DPR RI Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 50 orang anggota Pokmaswas yang tersebar di wilayah Kota Palembang, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara dan Kota Lubuk Lingau. Adapun Pokmaswas yang hadir yaitu dari Pokmaswas Sungai Denau dan Halilintar.

Capaian IKU "*Presentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP*" antara tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan. Karena pada tahun 2021 formulasi pengukuran IKU ini yaitu "*Presentase penyelesaian tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas*". Namun terdapat kesamaan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu target tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian pada tahun 2022 ini merupakan hasil koordinasi antara Pangkalan PSDKP Batam dengan DKP Provinsi yang telah membina POKMASWAS di masing-masing daerah. Pembinaan ini bertujuan agar kemampuan pada setiap anggota Pokmaswas terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan semakin meningkat. Selain itu dalam melaksanakan pembinaan telah mendapatkan acuan yaitu "*Form Keaktifan POKMASWAS*" yang disediakan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.



Capaian ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah Pokmaswas pada wilayah pengawasan di Batam lebih sedikit jika dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya.

Kemudian anggaran tahun 2022 untuk POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 109.090.000,-. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 109.087.833,- atau 99,99%.

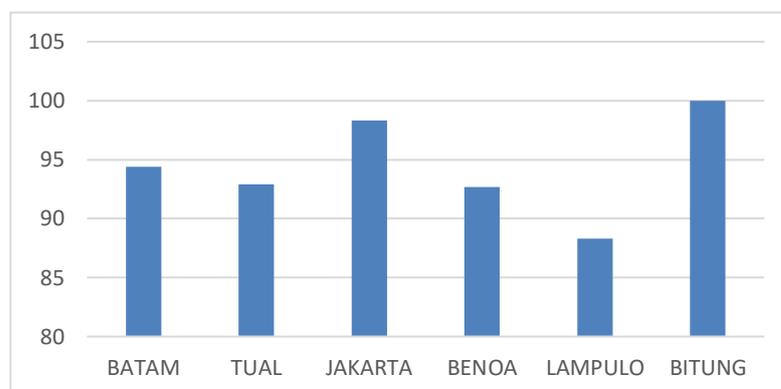
Evaluasi dan analisis pada IKU4, IKU5 dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 4 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif)** yaitu:

4) Indeks Kinerja Operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU4	Indeks Kinerja Operasi kapal pengawas	-	-	-	-	85	94,38	111,04	90

Indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 adalah 85 dan tercapai sebesar 94,38. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi pengawasan yang sesuai dengan target hari operasi. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 2 unti per hari operasi. Selain itu jumlah tangkapan dan tindak lanjut terhadap target operasi dilaksanakan dengan sangat baik. IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target renstra, Pangkalan PSDKP Batam menambah target sebesar 15 menjadi 90. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan SDKP menggunakan kapal pengawas. Indikator ini mengukur kemajuan operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Pada tahun 2022 kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan total 248 hari operasi. Terdapat 416 kapal yang diperiksa dan terdapat beberapa kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan tidak sesuai dengan izin yang diberikan serta 2 kapal hisap pasir yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Tual dan Lampulo. Hal tersebut dikarenakan jumlah kapal pengawas yang dioperasikan di Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak sehingga cakupan serta jumlah kapal yang diperiksa lebih banyak. Selain itu kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penangkapan pada kapal perikanan asing maupun Indonesia yang telah melakukan pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP lainnya.

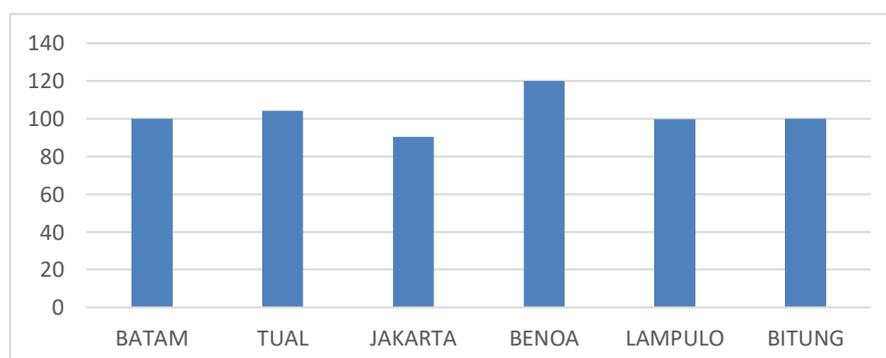
Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 20.575.568.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 20.422.701.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.421.926.608,- atau 99,99% dari pagu.

5) Indeks kinerja operasi Speedboat

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU5	Indeks Kinerja Operasi Speedboat	-	-	-	-	85	99,93	117,56	90

Indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 adalah 85 dan tercapai sebesar 99,93. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Tahun 2022 operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan total 152 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 231 unit. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas melakukan kegiatan operasi pengawasan yang sesuai dengan target hari operasi. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 2 unit per hari operasi.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target renstra, Pangkalan PSKDP Batam menambah target sebesar 15 menjadi 90. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan SDKP menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas.



Capaian indek kinerja operasi speedboat pengawas Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Jakarta dan Lampulo. Hal tersebut dikarenakan jumlah speedboat pengawas yang dioperasikan di Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak sehingga cakupan serta jumlah kapal yang diperiksa lebih banyak.

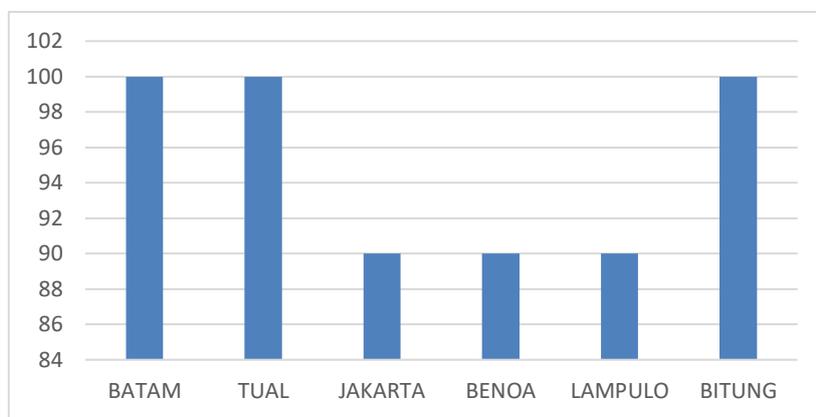
Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas sebesar Rp. 2.800.957.000,- yang selanjutnya diadakan revisi menjadi Rp. 836.385.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 835.691.311,- atau 99,92% dari pagu.

6) Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU6	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	-	-	-	-	90	100	111,11	90

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 adalah 90 dan tercapai 100. Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP baik logistik untuk kapal maupun untuk personel. Tercapainya indikator ini dikarenakan seluruh logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah terpenuhi mulai dari BBM, Pelumas, Air dan ATK.

IKU "*Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP*" merupakan indikator baru yang ada di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan renstra, target ini konsisten pada target 90.



Capaian indikator ini lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Jakarta, Bena dan Lampulo karena jumlah kapal lebih banyak dan hari operasi lebih tinggi, sehingga untuk pemenuhan logistik di Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi.

Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 20.575.568.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 20.422.701.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.421.926.608,- atau 99,99% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 6 (Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan)** yaitu:

7) Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU7	Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	100	100	100,00	100

Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan tercapai 100%. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan

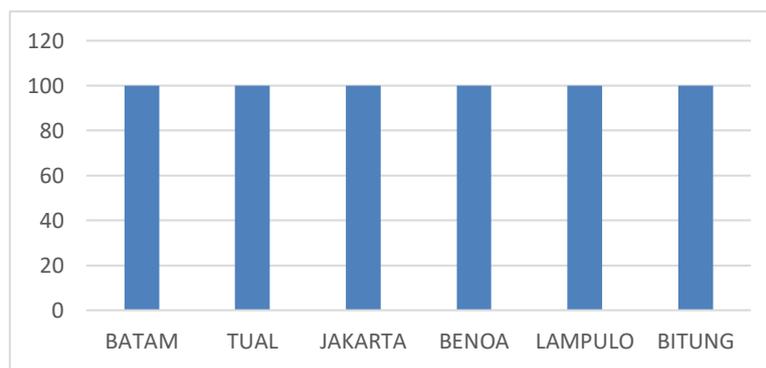
speedboat pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 04 dan KP. HIU 06. Kemudian untuk *speedboat* pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 14 unit. Adapun penyebaran unit *speedboat* adalah sebagai berikut:

1. Napoleon 015 di Satwas SDKP Palembang;
2. Napoleon 016 di Satwas SDKP Natuna;
3. Napoleon 027 di Satwas SDKP Anambas;
4. Napoleon 035 di Satwas SDKP Bangka;
5. Dolpin 015 di Wilker SDKP Tanjung Balai Karimun;
6. Dolpin 018 di Satwas SDKP Tanjung Pinang;
7. Dolpin 023 di Satwas SDKP Batam;
8. Dolpin 024 di Wilker SDKP Moro;
9. Dolpin 008 di Satwas SDKP Belitung;
10. Rubber Boat di Wilker SDKP Sadai;
11. Baramundi 01 di Pangkalan PSDKP Batam;
12. Rigid Inflatable Boat di Pangkalan PSDKP Batam;
13. URC Hiu Biru 01 di Pangkalan PSDKP Batam; dan
14. URC Hiu Biru 02 di Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat.

Tercapaiannya IKU ini dikarenakan telah selesainya perawatan yang dilakukan terhadap 17 unit kapal dan *speedboat* pengawas. Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan *General Overhaul* pada 2 unit armada pengawasan yaitu KP. HIU Macan 05 dan KP. HIU 03. Selain itu dilakukan *Docking* pada KP. HIU 17 dan Napoleon 16

serta *Overhaul* pada Napoleon 27. Untuk armada yang lainnya dilakukan perawatan yang rutin karena kondisinya masih baik.

IKU “*Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP*” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebab pada tahun 2021 formulasi perhitungannya hanya “*Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP*”. Namun terdapat persamaan presentase capaiannya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan renstra, target ini tetap konsisten sampai akhir periode renstra.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP lainnya, capaian indikator ini sama 100% karena perawatan sarana dan prasarana dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu untuk perawatan kapal dan *speedboat* pengawas pasti dilakukan sebab ada perawatan rutin yang harus dilakukan agar unit-unit tersebut siap beroperasi.

Tujuan inidaktor ini untuk mengukur sejauhmana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP. Pagu anggaran tahun 2022 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 10.173.940.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 12.203.026.000,- dan realisasi anggaran 99,99% atau sebesar Rp. 12.202.821.115,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU8, IKU9, IKU10 dan IKU11 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 6 (*Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif*)** yaitu:

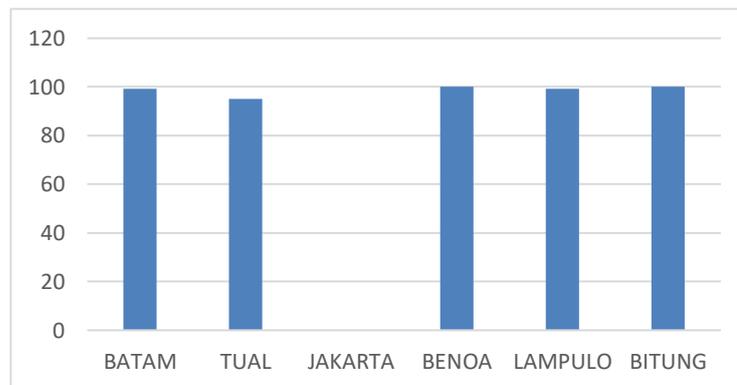
8) Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU8	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	93	99,03	93	99,33	106,81	93

Capaian persentase Efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai 99,33%. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Untuk presentase pada tahap penyelesaian proses penyidikan dihitung 100% apabila proses sudah sampai dengan tahap P-21 tahap II.

Pada tahun 2022, terdapat terdapat 5 kasus TPKP yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam yang 3 diantaranya sudah Tahap II. Kemudian 2 kasus masih Tahap I P21 sehingga ketikan dimasukkan dalam formulasi perhitungan masih belum bisa maksimal, namun sudah memenuhi target. Kemudian terdapat 1 kasus yang penangannya dilakukan pada tahun 2021 namun tahap II nya pada tahun 2022. Sehingga anggaran yang digunakan juga pagu anggaran tahun 2022. Karena hal tersebut 1 kasus itu dimasukkan dalam capaian di tahun 2022.

Capaian indikator “*Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam*” mengalami peningkatan sebesar 0,96% jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 yang sudah tidak ada kasus yang masih dalam tahap pemeriksaan seperti pada periode akhir tahun 2021. Dibandingkan dengan target renstra, indikator ini konsisten dengan target 93%.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Benoa dan Bitung, capaian Pangkalan PSDKP Batam masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kasus yang masih Tahap I P21 sampai dengan akhir tahun 2022, sedangkan di UPT lain sudah selesai Tahap II.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 mendapat pagu sebesar Rp 227.408.000,- yang direvisi menjadi Rp. 843.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 843.853.980,- atau 99,99%.

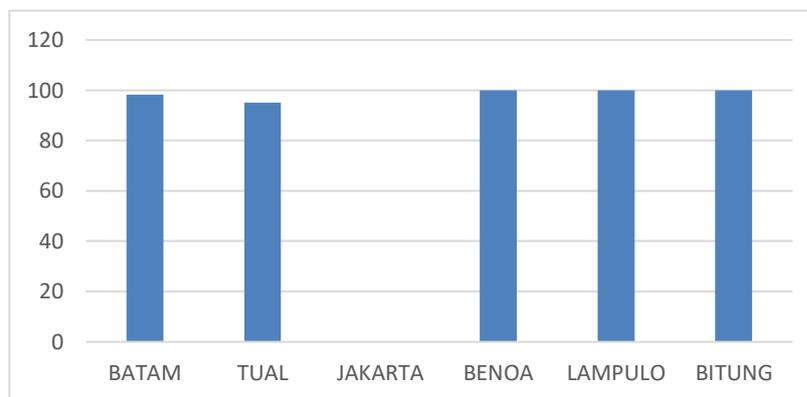
9) Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU9	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	-	-	93	98,33	105,73	93

Capaian persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tercapai 98,33%. Capaian IKU ini merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Indikator ini diukur dengan presentase perkembangan penanganan barang bukti dengan jumlah set barang bukti yang ditangani.

Pada tahun 2022, terdapat terdapat 5 kasus TPKP yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam yang 3 diantaranya sudah Tahap II. Kemudian 2 kasus masih Tahap I P21 sehingga ketikan dimasukkan dalam formulasi perhitungan masih belum bisa maksimal, namun sudah memenuhi target. Kemudian terdapat 1 kasus yang penangannya dilakukan pada tahun 2021 namun tahap II nya pada tahun 2022. Sehingga anggaran yang digunakan juga pagu anggaran tahun 2022. Karena hal tersebut 1 kasus itu dimasukkan dalam capaian di tahun 2022.

Capaian indikator “*Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam*” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target renstra, indikator ini konsisten dengan target 93%.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Benoa dan Bitung, capaian Pangkalan PSDKP Batam masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kasus yang masih Tahap I P21 sampai dengan akhir tahun 2022, sedangkan di UPT lain sudah selesai Tahap II. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 mendapat pagu sebesar Rp 37.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.590.000,- atau 99,97%. 3.

10) Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam

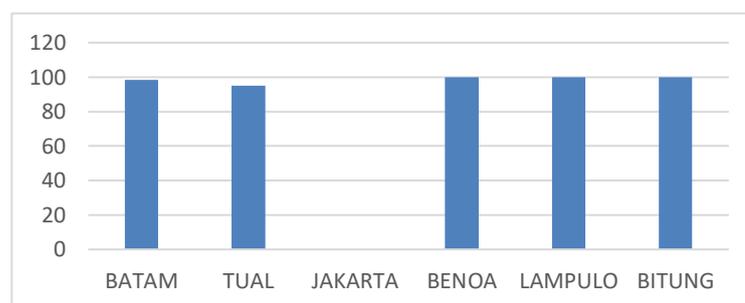
Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU10	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan awak kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	-	-	93	98,33	105,73	93

Capaian persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar 98,88%.

Capaian ini merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Indikator ini diukur dengan presentase perkembangan penanganan awak kapal dan awak kapal dengan jumlah kasus yang ditangani.

Pada tahun 2022, terdapat terdapat 5 kasus TPKP yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam dengan 18 awak kapal yang menjadi saksi dan tersangka. Sedangkan kasus yang sudah tahap II yaitu 3 kasus dengan 12 awak kapal, sedangkan sisanya masih dalam tahap I P21. Hal ini membuat capaian indikator ini belum maksimal, namun sudah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian indikator "*Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam*" tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target renstra, indikator ini konsisten dengan target 93%.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Benoa dan Bitung, capaian Pangkalan PSDKP Batam masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kasus yang masih Tahap I P21 sampai dengan akhir tahun 2022, sedangkan di UPT lain sudah selesai Tahap II.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 mendapat pagu sebesar Rp 556.800.000,-. Selanjutnya diadakan revisi menjadi Rp. 519.429.000,- dan realisasi sebesar Rp. 519.427.852,- atau 99,99%.

11) Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam

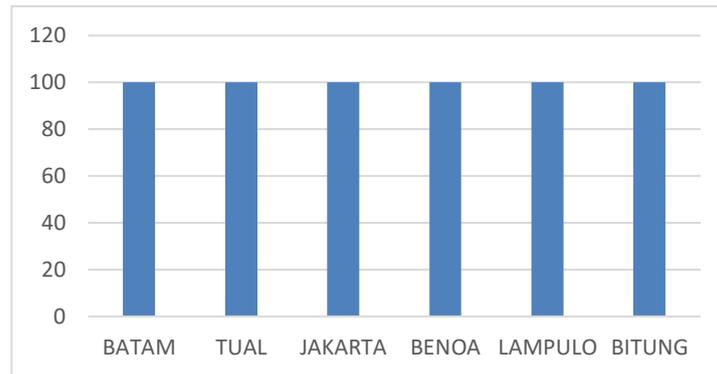
Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU11	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	-	-	80	100	120,00	90

Capaian persentase Efektivitas pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 100%. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administratif dengan jumlah pelanggaran dan sanksi administratif yang sudah ditangani.

Pada tahun 2022, Pangkalan PSDKP Batam telah mengenakan sanksi administratif pada 12 Kapal Ikan Indonesia dan 2 pelaku usaha pengolahan ikan yang melakukan pelanggaran dan telah selesai dibayarkan. Total denda administratif yang dibayarkan sebesar Rp. 2.866.204.000,00.

Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target renstra, indikator ini dinaikan target menjadi 90 dikarenakan Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pengenaan sanksi administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar dapat diselesaikan dengan baik serta dapat menambah pemasukan negara melalui PNBPN.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian indikator ini sama yaitu 100%. Karena pengenaan sanksi administrative yang dilaksanakan di masing-masing UPT sudah selesai dilaksanakan sampai dengan pembayaran denda.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 mendapat pagu sebesar Rp 100.000.000,- yang selanjutnya direvisi menjadi Rp. 128.282.000,- dan realisasi sebesar Rp. 128.281.290,- atau 99,99%.

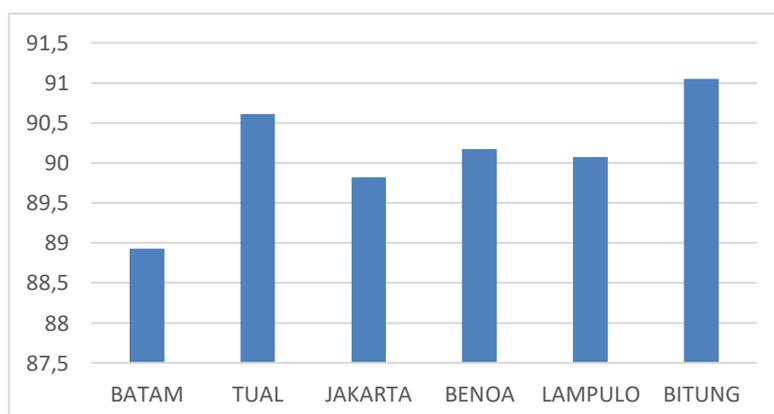
Evaluasi dan analisis pada IKU12, IK13, IK14, IK15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22 dan IK23 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 7 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

12) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IKU12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	87,08	80	91,40	80	88,93	111,16	85

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 adalah 88,93. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 2022 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 88,93 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan kategori “**B**”. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat selisih indeks sebesar 2,47. Hal ini dikarenakan terdapat selisih jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pangkalan PSDKP Batam. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya. Jika dibandingkan renstra, target Pangkalan PSDKP Batam meningkat menjadi 85 karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pelayanan yang diberikan akan semakin baik.



Capain indikator ini masih belum optimal apabila dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya karena jumlah responden yang disurvei lebih sedikit. Hal ini menyebabkan nilai lebih rendah namun masih mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2022 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 38.788.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 33.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.760.000,- atau 100%.

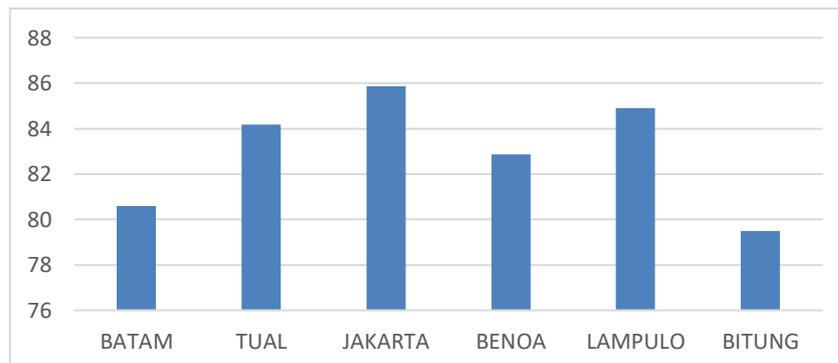
13) Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK13	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	88,23	75	78,41	75	80,58	107,44	75

Target Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 adalah 75 dan tercapai 80,58. Tercapainya target ini dikarenakan sistem reformasi birokrasi di Pangkalan PSDKP Batam berjalan dengan baik serta adanya pendampingan dari Sekretariat Ditjen. PSDKP mengenai pemenuhan dan kualitas dokumen WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika dibandingkan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 2,14 yang menandakan bahwa Reformasi dan birokrasi di Pangkalan PSDKP Batam semakin baik. Dibandingkan renstra, target pada indikator ini konsisten sebesar 75.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya redaksi pada beberapa laporan kurang tepat. Selain itu terdapat beberapa dokumen yang masih dalam pengerjaan sehingga menyebabkan nilai pada LKE belum bisa maksimal. Meski demikian target nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam mencapai target yang ditentukan.

Pagu anggaran untuk pembangunan serta monev pembangunan zona integritas (ZI) sebesar Rp. 20.800.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 33.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.760.000,- atau 100%.

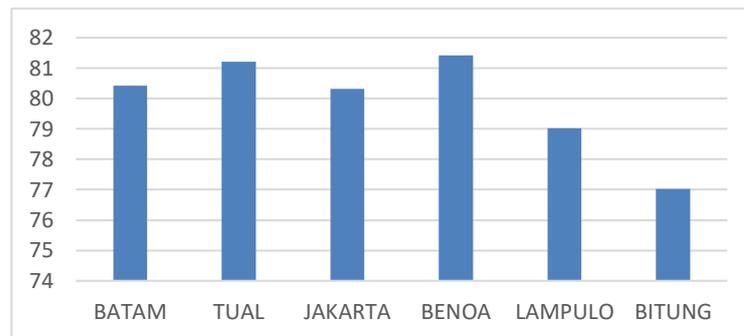
14) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73,3	73	79,03	77	80,43	104,45	77

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2022 adalah 77 dan ditetapkan sebagai target semesteran dan tercapai 80,43. Hal ini dikarenakan pegawai Pangkalan PSDKP Batam semakin banyak yang mengikuti pelatihan dan bimtek sehingga memperoleh sertifikat. Selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dan sudah aktif kembali.

Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 80,43 dan pada tahun 2021 79,03. Terdapat peningkatan indeks ini dikarenakan semakin banyaknya pegawai yang mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Jika dibandingkan dengan renstra, maka terdapat konsistensi target yaitu sebesar 77 yang bertujuan untuk mempertahankan capaian yang sudah dilaksanakan.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Bitung, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang mengikuti bimtek maupun pelatihan di Pangkalan PSKDP Batam lebih banyak jika dibandingkan dengan pegawai Pangkalan PSKDP Bitung. Selain itu jumlah pegawai di Pangkalan PSKDP Bitung lebih banyak sehingga dapat mempengaruhi rata-rata nilai pada Indeks Profesional ASN.

Adapun anggaran tahun 2022 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai sebesar Rp. 95.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 93.711.000,-. terealisasi sebesar Rp. 93.710.391,- atau 99,99%.

15) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	94,65	90	96,70	90	97,42	108,24	90

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 97,42. Hal ini dikarenakan seluruh dokumen kinerja di Pangkalan PSDKP Batam telah tersedia kemudian saling keterkaitan antara perencanaan kinerja dan laporan kinerja. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Batam adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1). Perjanjian Kinerja;
- 2). Manual IKU;
- 3). Rincian Target IKU;

- 4). Rencana Akasi;
- 5). LKj/LCK; dan
- 6). Data dukung LKj/LCK.

b. Aspek kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

- Kriteria dokumen yang disandingkan:
 1. PK – LKj/LCK;
 2. LKj/LCK – Kinerja; dan
 3. PK – Kinerja.
- Realisasi:
 1. LKj/LCK TW I – Kinerja;
 2. LKj/LCK TW II – Kinerja; dan
 3. LKj/LCK TW III – Kinerja.
- Informasi data:
 1. Manual IKU – Kinerja; dan
 2. Rincian Target IKU – Kinerja

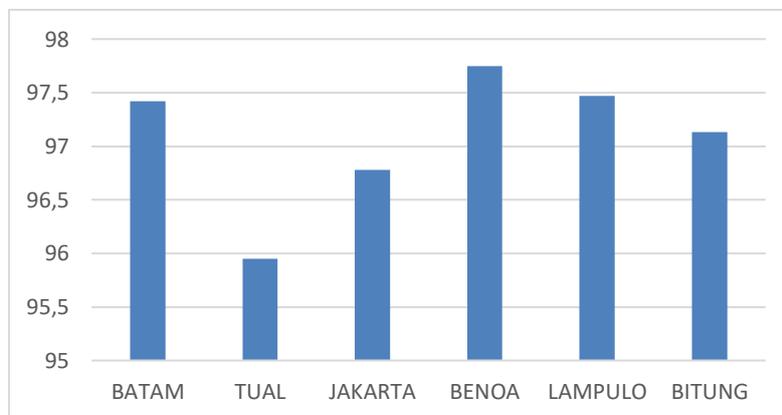
c. Aspek ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan Rata-rata NPSS triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulan bernilai maksimal atau 120.

d. Aspek Ketepatan

Aspek ini merupakan aspek baru dan diterapkan pada pengukuran di tahun 2022. Nilai ketepatan diperoleh dari ketepatan penyampaian LKj tahunan pada aplikasi e-Sakip Reviu dan penyampaian ke atasan. Nilai ini akan bernilai 100 apabila pengumpulan LKj tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian.

Nilai rekonsiliasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 96,70 dan pada tahun 2022 sebesar 97,42. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim Monev Ditjen. PSDKP sehingga terjadi perbaikan redaksi pada laporan serta ketepatan waktu pengumpulan. Target sebesar 90 akan dipertahankan hingga berakhirnya periode renstra, sehingga kinerja Pangkalan PSDKP Batam tidak mengalami penurunan.

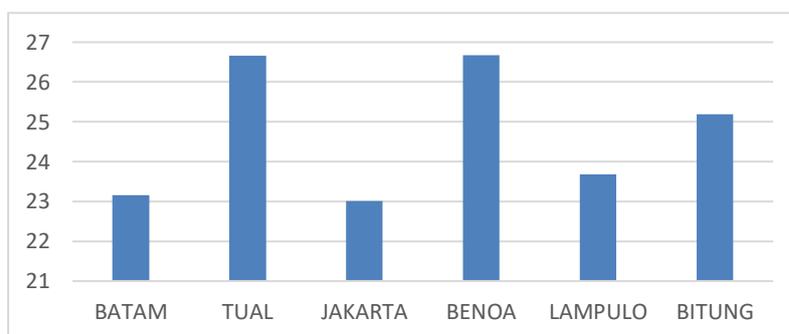


Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Tual dan Jakarta, capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan rata-rata NPSS pada setiap triwulannya lebih tinggi yang menyebabkan nilai rekonsiliasi optimal. Anggaran untuk rekonsiliasi kinerja pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.559.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.557.876,- atau 99,99%.

16) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	-	-	21	23,16	110,29	21

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 21 dan tercapai 23,16. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2021 tidak terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen

budaya kerja masih belum maksimal. Namun pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja telah dilakukan.

Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 39.114.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.094.072,- atau 99,94%.

17) Unit yang menerapkan Inovasi pelayanan publik inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam

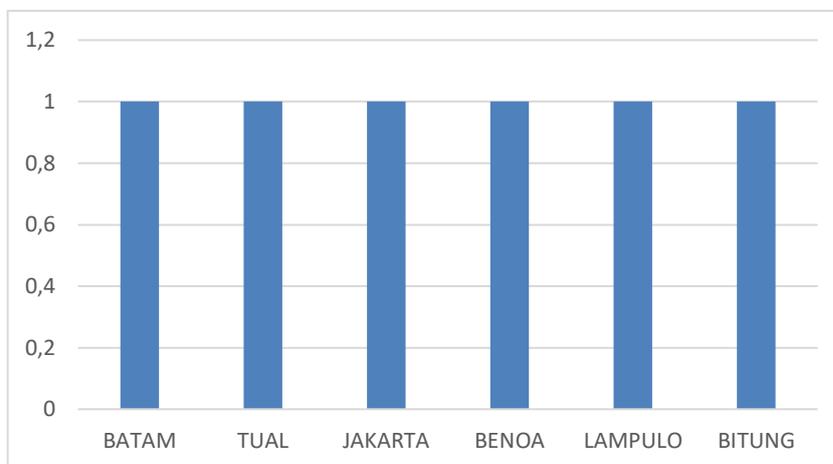
Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK17	Unit yang menerapkan Inovasi pelayanan publik inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	1	1	1	1	100,00	-

Target Unit yang menerapkan Inovasi pelayanan publik inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan ditetapkan sebagai target tahunan dan tercapai. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru melainkan pula mencangkup satu pendekatan

baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayan publik yang ada.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

Pangkalan PSDKP Batam membuat inovasi aplikasi SICEPAT KILAT (Sistem Identifikasi Cepat Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Langsung dan Akurat). Dengan adanya aplikasi ini, proses pendataan awak kapal kasus TPKP dapat lebih cepat serta tersimpan dalam database. Sehingga apabila ada awak kapal yang telah terdaftar sebelumnya akan terlihat. Untuk selanjutnya aplikasi ini akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan maupun Imigrasi guna mempercepat proses penyelesaian kasus TPKP. Pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Batam juga membuat inovasi berupa aplikasi NAPOLEON (Pelayanan Pengajuan SLO Online) yang bertujuan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu pengajuan ketika kapal melapor kedatangan maupun keberangkatan.



Pangkalan PSDKP Batam beserta dengan UPT lainnya telah membuat masing-masing satu inovasi. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan sebesar Rp 3.000.000,- kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 39.114.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99,94%.

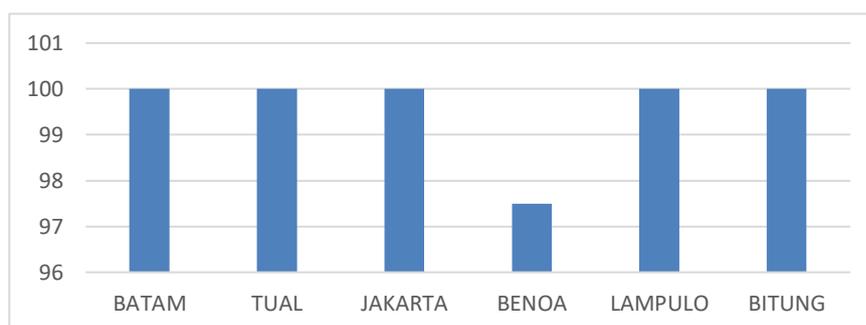
18) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	72,5	100	75	100	120,00	80

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 75 dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam berjalan dengan baik. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator ini sama yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Selain itu aset-aset hasil pengadaan telah didukung BAST/Berita Acara Pemakaian yang menandakan adanya kegiatan administrasi yang baik. Jika dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target yaitu menjadi 80 karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan baik.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Bena, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen serta pengelolaan BMN berjalan dengan baik.

Pada tahun 2022 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu penyusunan laporan BMN sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 26.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.295.850,- atau 99,99%.

19) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

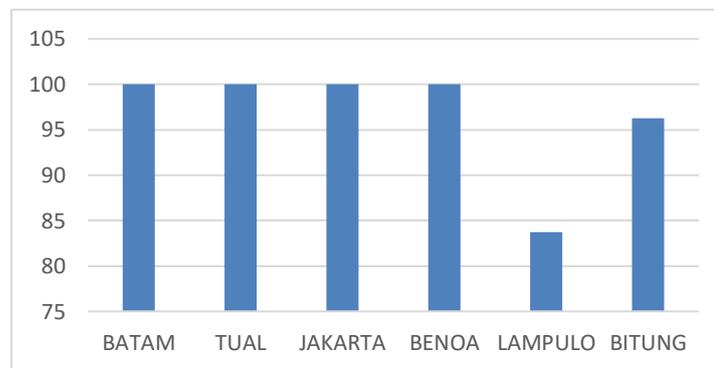
Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK19	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	72,5	89,73	75	100	120,00	80

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 75 dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Pangkalan PSDKP Batam berjalan dengan baik. Selain itu terdapatnya pegawai yang telah mengikuti pelatihan mengenai pengadaan barang dan jasa juga menambah kinerja di indikator ini. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);

2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator ini sama yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola pengadaan barang dan jasa Ditjen. PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Jika dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target yaitu menjadi 80 karena Pangkalan PSDKP Batam optimis bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan baik.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Lampulo dan Bitung, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen serta penggunaan aplikasi pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik.

Pada tahun 2022 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 109.330.000,-. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 108.349.300,- atau 99,10%.

20) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

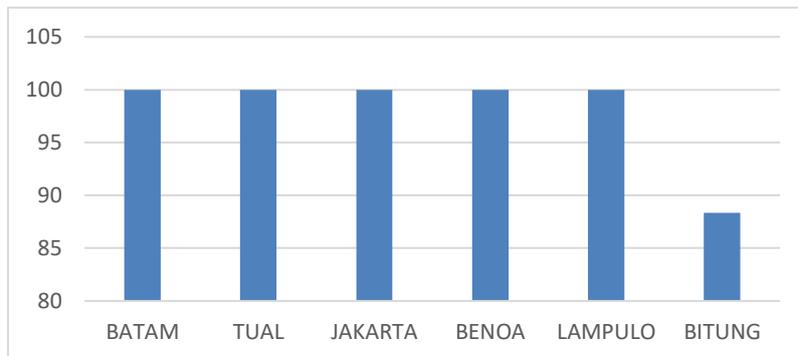
Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	85	84	89,72	86	100	116,28	90

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 100%. Optimalnya pencapaian ini karena pegawai *bitrix.24* yang telah *posting* pada halaman berita *bitrix.24*. *Postingan* yang dilakukan yaitu minimal enam kali dan tiga bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi *bitrix24* (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi *bitrix24* (Level 3, 4 dan staf).

Terdapat kenaikan capaian pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 10,28%. Hal ini dikarenakan operator *bitrix* di Pangkalan PSDKP Batam rata-rata melakukan *postingan* sebanyak 2 kali dalam satu bulan yang mengandung unsur

5W+1H. Selain itu jumlah operator mengalami penambahan yang semula 4 operator yaitu pejabat eselon III dan Eselon IV menjadi 10 operator dengan ditambahkan 6 pegawai yang berada di Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Jika dibandingkan dengan target renstra, terdapat penambahan target menjadi 90% agar dapat mempertahankan pencapaian.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Bitung, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat keaktifan penggunaan aplikasi *bitrix.24* Pangkalan PSKDP Batam lebih banyak. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yaitu publikasi dan humas Ditjen PSDKP sebesar Rp. 9.400.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 3.161.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.160.800,- atau 99,99%.

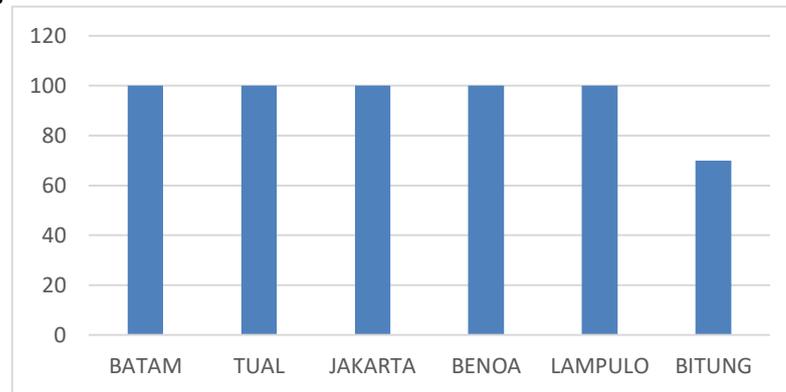
21) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK21	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	70	100	120,00	80

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 70% dan ditetapkan sebagai target triwulan serta tercapai 100%. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP

Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021. Terdapat beberapa audit, reviu dan evaluasi mengenai keuangan, kinerja, BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal KKP, Pangkalan PSDKP Batam telah nihil temuan untuk tersebut dikarenakan sudah ditindak lanjuti.

Dengan demikian maka capaian untuk “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” adalah 100% karena temuan yang direkomendasikan sudah ditindak lanjuti.



Capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Bitung. Hal ini dikarenakan seluruh rekomendasi tindak lanjut Itjen di Pangkalan PSDKP Batam seluruhnya telah dilaksanakan, sedangkan di Pangkalan PSKDP Bitung masih terdapat rekomendasi yang belum ditindak lanjuti.

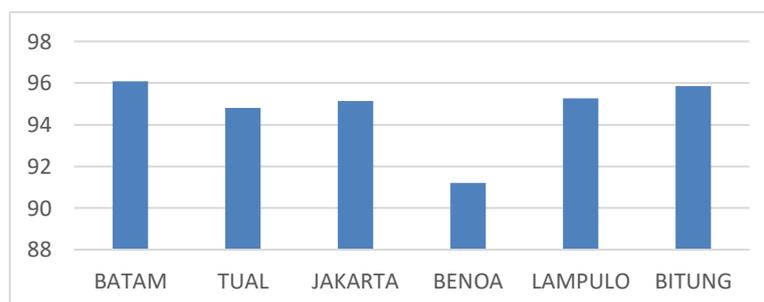
IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada pada tahun 2022. Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 12.500.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 923.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 922.910,- atau 99,99%.

22) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK22	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	88	94,06	89	97,08	89	96,09	107,97	89

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan tercapai 96,09. Hal ini disebabkan penyerapan anggaran di Pangkalan PSDKP Batam tinggi disertai dengan pelaporan pertanggung jawaban yang baik. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2022 ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian dengan tahun 2022 terdapat selisih sebesar 0,99. Hal tersebut dikarenakan ada deviasi halaman III DIPA yang dipengaruhi oleh belum Nihilnya GUP dan PTUP pada saat diambilnya capaian tersebut.



Dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran dan capaian output lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan lainnya, sehingga mempengaruhi nilai total IKPA.

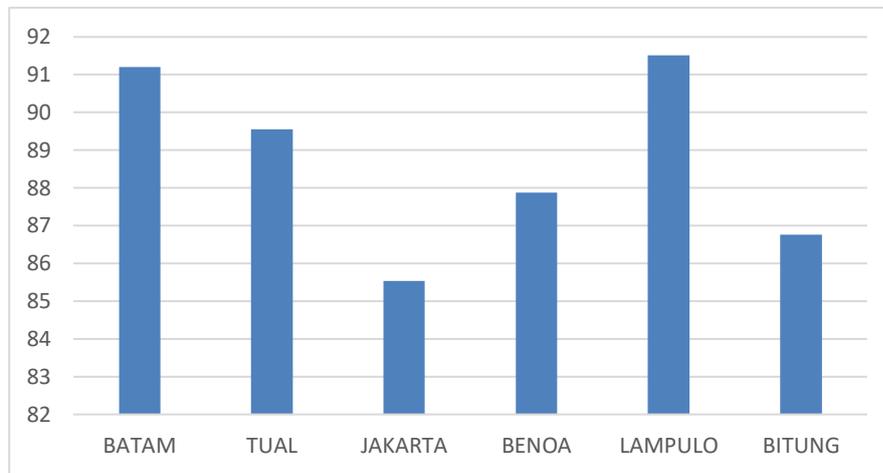
Adapun anggaran tahun 2022 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan anggaran sebesar Rp. 39.800.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 39.792.472,- atau 99,98%.

23) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2020		2021		2022			Target 2024
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	
IK23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	86	86,03	81	91,20	112,59	86

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 91,20. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 capaian output pada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melebihi dari target yang ditentukan sehingga menambah nilai kinerja anggaran. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan terget yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Target Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 86 dan ditetapkan sebagai target tahunan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,17. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 capaian output pada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melebihi dari target yang ditentukan sehingga menambah nilai kinerja anggaran. Jika dibandingkan dengan target renstra, Pangkalan PSDKP Batam optimis dengan target 86.

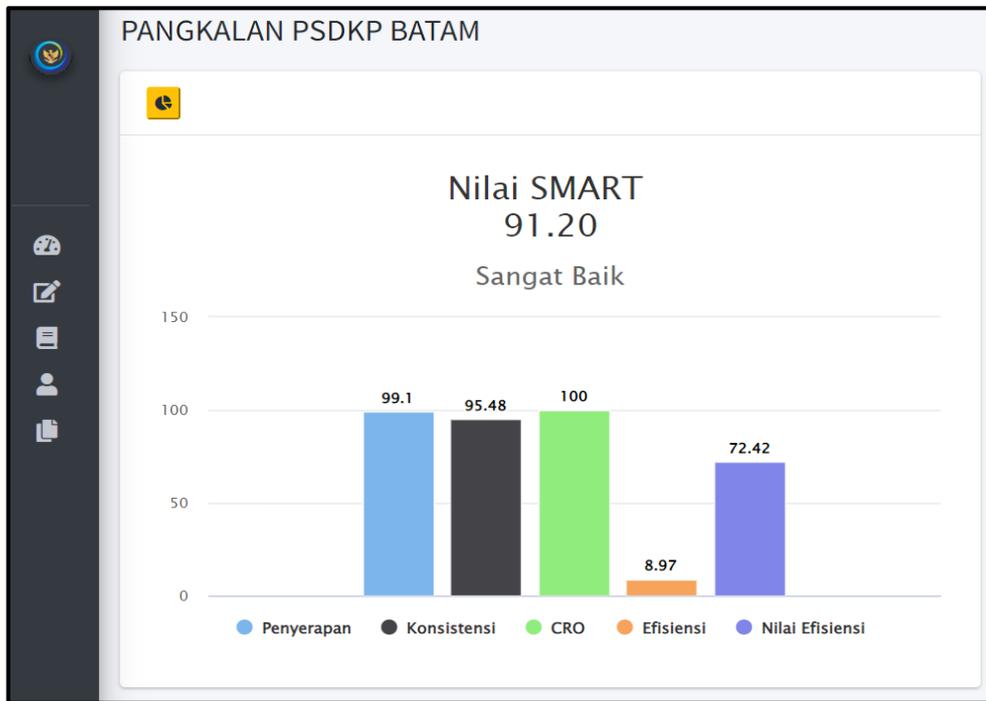


Apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Tual dan Benoa, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi karena target output pada Pangkalan PSKDP Batam lebih besar. Kemudian target-target tersebut seluruhnya mencapai target dan beberapa ada yang melebihi dari target hingga 120%.

Pada tahun 2022 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu sebesar Rp. 22.981.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 22.980.864,- atau 99,99%.

Seluruh target kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang telah diperjanjikan seluruhnya telah mencapai target dengan Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022 sebesar **107,04**.

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2022 terbilang efisien. Adapun rincian hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Efisiensi Pangkalan PSDKP Batam

Efisiensi penggunaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022 sebesar 8,97. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan anggaran di Pangkalan PSDKP Batam efektif. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kelautan terutama pengawasan pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan *onboard* pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2022 sebesar Rp. 57.982.619.000,-. kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 52.957.149.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan

kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 52.935.602.148,- atau 99,96%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	32.734.817.000	32.733.835.556	99,99
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	972.154.000	972.135.270	99,99
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	625.863.000	625.800.492	99,99
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	542.729.000	542.682.533	99,99
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	18.081.586.000	18.061.148.297	99,98
TOTAL			52.957.149.000	52.935.602.148	99,96

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan tahun 2022 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan. Hal tersebut tidak terlepas dari perencanaan serta monitoring capaian target yang dilakukan dengan baik oleh Pangkalan PSDKP Batam. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP.
3. Dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2022 dengan melakukan perubahan target pada IKU **“Indeks kinerja operasi kapal pengawas”** dan **“Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”** yang semula target dengan nilai 87,5 menjadi 85.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2022, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Terdapat pegawai <i>bitrix.24</i> yang masih belum memposting minimal dua berita pada halaman <i>bitrix.24</i> pada setiap bulannya dengan berpedoman pada 5W+1H	Melakukan monitoring <i>postingan</i> pada aplikasi <i>bitrix.24</i> pada setiap bulannya
2.	Masih adanya pemilik atau nahkoda kapal perikanan yang belum mengerti tentang pengajuan permohonan kedatangan maupun keberangkatan melalui aplikasi eslo.kkp.go.id	Melakukan pendampingan kepada pemilik atau nahkoda kapal perikanan yang akan melakukan pengajuan permohonan kedatangan maupun keberangkatan melalui aplikasi eslo.kkp.go.id

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

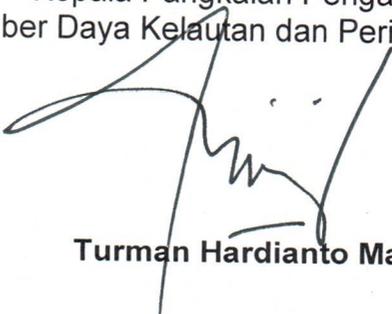
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam


Adin Nurawaluddin


Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,5
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP (indeks)	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	77
		ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (unit)	1
		ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	86
		ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	81

“bekerja dengan integritas dan totalitas”

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	832.765.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	859.041.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
sKegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	33.866.033.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.498.692.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17.514.456.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		54.380.509.000

Jakarta 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditijenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	85
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	85
		ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSKDP Batam (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		ISK5.1.2	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		ISK5.1.3	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	77
		ISK5.1.4	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		ISK5.1.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK5.1.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK5.1.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	75
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	86
		ISK5.1.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		ISK5.1.12	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	625.863.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	542.729.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan</i>	
sKegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	32.734.817.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK3.2	<i>Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP</i>	
SK3.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	972.154.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.801.586.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		52.597.149.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	-	95	100	100	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
IKU3	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	-	-	87	90	100
IKU4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	-	-	87,5	88	90
IKU5	Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas	-	-	87,5	88	90
IKU6	Indeks kinerja pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP	-	-	90	90	90
IKU7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	100	100	100	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
IKU8	Persentase efektivitas penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	93	93	93	93
IKU9	Persentase efektivitas penanganan barang bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	93	93	93	93
IKU10	Persentase efektivitas penanganan awak kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	93	93	93	93
IKU11	Persentase efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	80	85	90
IKU12	Persentase efektivitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	80	83	85
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP						
IKU13	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	80	80	83	85
IKU14	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	75	75	75	75
IKU15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73	77	77	77
IKU16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	90	90	90	90

IKU17	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	21	21	21
IKU18	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	1	1	-	-
IKU19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	72,5	75	77	80
IKU20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	72,5	75	77	80
IKU21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	84	86	87	90
IKU22	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	75	80
IKU23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88	89	89	89	89
IKU24	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	86	81	86	86

EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

[UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BATAM]

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAAL)	ANGGARAN/PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	2022		PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
		KODE	INDIKATOR						T	R				
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	IKU1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	376.233.000	376.211.367	Pelaku Usaha	7	7	13				
				Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites	28.348.000	28.348.000	Pelaku Usaha	3	3	5				
				Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan	96.211.000	96.207.942	Pelaku Usaha	21	21	31				
				Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	32.759.000	32.758.546	Pelaku Usaha	10	10	30				
				Unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	56.328.000	56.327.296	Pelaku Usaha	11	11	17				
				Unit Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing	35.984.000	35.947.341	Pelaku Usaha	25	25	40				
				Kapal Perikanan yang diperiksa Kepatuhan nya	322.490.000	322.458.852	Unit Kapal	1.639	1.639	1.802				
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	IKU2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	Unit Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan yang diperiksa Kepatuhan nya	67.972.000	67.971.099	Pelaku Usaha	31	31	62				
				Unit Usaha Pembudidayaan Ikan	100.490.000	100.476.520	Pelaku Usaha	19	19	20				
				Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Perikanan	51.777.000	51.776.062	Pelaku Usaha	30	30	39				
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	IKU3	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	POKMASWAS yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	109.090.000	109.087.833	POKMASWAS	2	2	2				
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IKU5	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Operasi Kapal Pengawas	20.422.701.000	20.421.926.608	Hari Operasi	66	66	66				
				Operasional Speed Boat 8 Meter	203.183.000	203.079.421	Hari Operasi	13	13	13				
				Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin)	445.664.000	445.127.090	Hari Operasi	13	13	13				
				Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	107.346.000	107.345.000	Hari Operasi	13	13	13				
				Operasional Rigid Inflatable Boat	80.192.000	80.139.800	Hari Operasi	13	13	13				
				Operasi Kapal Pengawas	20.422.701.000	20.421.926.608	Hari Operasi	66	66	66				
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IKU7	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	Arrmada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12.203.026.000	12.202.821.115	Unit	17	17	17				
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	IKU8	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang yang Ditangani	843.872.000	843.853.980	Perkara	6	6	6				
				Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang	37.600.000	37.590.000	Perkara	6	6	6			
				Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sedang	519.429.000	519.427.852	Perkara	6	6	6			
				Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	128.282.000	128.281.290	Perkara	5	5	14			
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Lait Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Forum Konsultasi Publik	33.760.000	33.760.000	Laporan	1	1	1				
				Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	6.673.000	6.672.925	Laporan	1	1	1				
				Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93.711.000	93.710.391	Laporan	1	1	1				
				Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	11.559.000	11.557.876	Laporan	1	1	1				
				Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	39.114.000	39.094.072	Laporan	1	1	1				
				Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	39.114.000	39.094.072	Laporan	1	1	1				
				Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	26.296.000	26.295.850	Laporan	1	1	1				
				Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	70.000.000	69.349.300	Unit	19	19	19				
				Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	39.330.000	39.000.000	Unit	4	4	4				
				Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	3.161.000	3.160.800	Laporan	1	1	1				
				Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	39.800.000	39.792.472	Laporan	1	1	1				
IK23	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	22.981.000	22.980.864	Laporan	1	1	1						

Batam, 13 Januari 2023
 Kepala Pangkalan PSDKP Batam

 Turman Hardianto Maha, S.P., M.P.
 NIP. 19 11123 199903 1 001